

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2022)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Zuliani Saputri

1905046020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Zuliani Saputri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Zuliani Saputri

NIM : 1905046020

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 2022"

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 September 2023

Pembimbing I

Dr. Choirul Huda, M.Ag
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Irma Istiarani, M.Si
NIP. 198807082019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (G24) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Zuliani Saputri
NIM : 1905046020
Judul : **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. (Studi Kasus Pada KPP Semarang Barat Tahun 2022)**

Telah dimunaqotahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **cumlaude/baik/cukup**, pada tanggal: **27 September 2023**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 September 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Sekretaris Sidang

Irma Istiariyani, SE., M.Si.
NIP. 198807082019032013

Penguji Utama I

Siti Nurngani, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198312012015032004

Penguji Utama II

Dedy Noor Farida, SE., M.Si., CA.
NIP. 197912222015032001

Pembimbing I

Choirul Huda, Mag.
NIP. 197607092005011002

Pembimbing II

Irma Istiariyani, SE., M.Si.
NIP. 198807082019032013



MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”

“Mengucap kata sabar dan bersyukur itu mudah tetapi untuk menjalankannya itu yang sulit, karena rasa sabar dan syukur itu bukan hanya ucapan kata melainkan dari hati kita sendiri semakin besar rasa sabar dan syukur dihati kita semakin besar pula rasa kebahagiaan itu datang.”

zuliani saputri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah, adalah kalimat yang tepat saya ucapkan atas setiap langkah perjuangan yang telah dilalui hingga detik ini. Dengan kerendahan hati serta perjuangan, saya persembahkan karya sederhana ini yang telah diraih dengan penuh suka, duka dan air mata kepada orang-orang saya cintai, saya kasihi dan yang telah mengiringi setiap langkah saya dalam meraih kesuksesan:

1. Orang tuaku tersayang, (Alm) Bapak Wagimun dan (Almh) Ibu Samiati yang telah membesarkan dan mengasih saya dengan setulus hati. Terimakasih selalu memberikan semangat serta dukungan moril dan materiil yang tak terhingga. Terimakasih bapak ibu atas jasa kalian yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Terimakasih udah pernah buat saya menjadi orang yang paling bahagia didunia ini bapak,ibu sampek detik ini saya bertahan saya kuat karna kalian terimakasih orang tuangku yang selalu dihatiku.
2. Untuk kedua saudara/i dan kakak abng ipar saya yang tersayang, zulfitrianto dan dewi puspita, juliana elisa dan alex agustoni, Terimakasih atas segala suport dan semangatnya dalam setiap langkah ku menimba ilmu, terimakasih juga telah menjadi warna yang menemani hari-hariku saat dirumah.
3. Untuk M.r Jorge yang tercinta terimakasih atas dukungan suport dan penyemngat dalam langkahku untuk menimba ilmu dan slalu memberikan motivasi kepadaku terimakasih juga sudah setia menemaniku.
4. Sobat-sobat tersayangku di perkuliahan. Tian Widarti, Jhela Purnamasari, Febyana Rahmawati, Diana Resti, Debora Ananda, dan Putri Nurischa, Terimakasih banyak atas segala support dan dukungan kalian yang sangat berarti. Terimakasih juga sudah membersamai dan memberikan banyak momen bagiku dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Adik- Adik Kos Tersayang, Qilbi, Farikha, Dafina, Nanda, Dian, Maya, Olive, Dan seluruh anak kos buntu, Terimakasih telah memberikan support dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman KMA, IMAGAS terimakasih Terimakasih telah memberikan support dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Teman-teman Nusantaraku AKS-A 19 yang telah menjadi keluarga sekaligus sahabat, terimakasih telah mendukung penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 september 2023

Penulis



Zuliani Saputri
NIM.1905046020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Alif	خ = Kha	ش = Sya	غ = Gha	ن = Na
ب = Ba	د = Da	ص = Sha	ف = Fa	و = Qa
ت = Ta	ذ = Dza	ض = Dal	ق = Qa	ه = Ha
ث = Tsa	ر = Ra	ط = Tha	ك = Ka	ء = A
ج = Ja	ز = Za	ظ = Zha	ل = La	
ح = Ha	س = Sa	ع = ‘	م = Ma	

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَ....	fathah dan ya	Ai
وَ....	fathah dan wau	Au

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī
و...ؤ	Dhammah dan wau	Ū

E. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Dalam suatu negara, arti penting pajak bukan hanya sekedar menjadi sumber penerimaan yang melancarkan pembangunan nasional saja, tetapi juga sebagai sumber utama perbelanjaan pemerintah. Penerimaan pajak sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi negara. Namun pelaksanaan perpajakan di Indonesia seringkali mengalami berbagai kendala diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan tidak konsisten, lemahnya penegakan hukum tentang sanksi denda terhadap pelanggaran perpajakan, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

Berdasarkan fenomena diatas faktor pertama yang mempengaruhi penerimaan pajak yakni pemeriksaan pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang dengan menegur atau mengingatkan, melaksana penyitaan, menjual barang yang telah disita (Diaz,2012). Semakin tinggi tingkat penagihan pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratam Semarang Barat tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 120 responden. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh*. Metode ini merupakan dimana semua populasi dijadikan sampel. Data penelitian ini menggunakan SPSS versi 16 dengan menguji linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara persial dan simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2020.

Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

In a country, the importance of taxes is not only as a source of revenue that facilitates national development, but also as the main source of government spending. Tax revenue is very important to support the country's economic activities. However, the implementation of taxation in Indonesia often experiences various obstacles, including inconsistent laws and regulations governing taxation, weak law enforcement regarding fines for tax violations, and a lack of awareness among the public about paying taxes.

Based on the phenomenon above, the first factor that influences tax revenue is tax audit. The second factor that influences tax revenue is tax collection which is a series of actions so that taxpayers pay off debts by reprimanding or reminding them, carrying out confiscations, selling goods that have been confiscated (Diaz, 2012). The higher the level of tax collection, the higher the level of tax revenue.

This research aims to test the effect of tax audits and tax collection on tax revenues at KPP Pratam West Semarang in 2020. This type of research is quantitative hypothesis testing. The data used is primary data. The population in this study was 120 respondents. The sampling technique in this research used a saturated sampling technique. This method is where the entire population is sampled. This research data uses SPSS version 16 with multiple linear testing. The results of this research show that tax audits and tax collection have a partial and simultaneous effect on tax revenues at KPP Pratama West Semarang in 2020.

Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Tax Revenue.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Semarang Barat Tahun 2020)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt. selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Irma Istiariani, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I., selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di universitas.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
7. Orang tua saya (Almarhum) Bapak Wagimun dan (Almarhumah) Ibu Samiati terimakasih banyak untuk malaikat tak bersayabku biarpun kalian sudah tidak ada

didunia ini tetapi kalian slalu ada dihati kalian juga yang buat adek bertahan sampek dititik ini terimakasih.

8. Kedua saudara/i dan saudara/i ipar saya tersayang : Zulfitrianto dan Dewy Puspita, Juliana elisa dan Alex Agustoni, atas dukungan semangat dan motivasi kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Kantor KPP Pratama Semarang Barat yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Teori Atribusi	12
2.2 Pajak	12
2.2.1 Fungsi Pajak	13
2.2.2 Jenis-Jenis pajak.....	14
2.3 Pajak Dalam Islam.....	15

2.3.1	Pengertian Pajak Dalam	15
2.4	Penerimaan Pajak	17
2.4.1	Indikator Penerimaan Pajak	19
2.5	Pemeriksaan Pajak	20
2.5.1	Tujuan Pemeriksaan Pajak	20
2.5.2	Jenis Pemeriksaan pajak.....	20
2.5.3	Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	21
2.5.4	Indikator Pemeriksaan Pajak.....	21
2.6	Penagihan Pajak.....	22
2.6.1	Jenis Penagihan Pajak	23
2.6.2	Timbulnya Utang Pajak.....	25
2.7	Penelitian Terdahulu	26
2.8	Kerangka Berfikir.....	36
2.9	Hipotesis Penelitian.....	36
2.9.1	Hipotesis Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.....	36
2.9.2	Hipotesis Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak	38
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Jenis dan Sumber Data Penelitian	40
3.1.1	Jenis Penelitian.....	40
3.1.2	Sumber Data.....	40
3.2	Populasi dan Sampel	41
3.2.1	Populasi	41
3.2.2	Sampel.....	41
3.3	Metode Pengumpulan Data	42
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	42
3.5	Teknis Analisis Data.....	46

3.6 Uji Intrusmen Penelitian	47
3.6.1 Uji Validitas	47
3.6.2 Uji Realiabilitas	47
3.6.3 Uji asumsi klasik	48
3.6.4 Analisi Regresi	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1 Visi, Misi dan Lokasi KPP Pratama Semarang Barat.....	53
4.1.2 Struktur Oraganisas	54
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	55
4.2.1 Jenis Kelamin Responden	56
4.2.2 Usia Responden	56
4.2.3 Pendidikan Responden.....	56
4.2.4 Lama Bekerja Responden	57
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	58
4.4 Analisis Data.....	59
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.6 Uji Hipotesis	63
4.7 Pembahasan Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak KPP Semarang Barat.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Bobot dan Kategori skala likert	41
Tabel 3.2 Variabel, Definisi, Indikator dan Skala Pengukur likert.....	41
Tabel 4.1 Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.....	56
Tabel 4.2 Uji Validitas.....	63
Tabel 4.3 Realibilitas	63
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	64
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4.6 Uji Regresi Linier Berganda	67
Tabel 4.7 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	68
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F).....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2020-2021	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Pratma Semarang Barat	62
Gambar 3 Uji Normalitas.....	64
Gambar 4 Heteroskedastisitas.....	66

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	84
Lampiran 3 Hasil Output SPSS_Uji Validitas	86
Lampiran 4 Hasil Output SPSS_Uji Reliabilitas	86
Lampiran 5 Hasil Output SPSS_Uji Normalitas.....	87
Lampiran 6 Hasil Output SPSS_Uji Multikolinieritas	87
Lampiran 7 Hasil Output SPSS_Uji Heteroskedastisitas	88
Lampiran 8 Hasil Output SPSS_Uji Regresi Linier Berganda	88
Lampiran 9 Hasil Output SPSS_Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t).....	89
Lampiran 10 Hasil Output SPSS_Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	89
Lampiran 11 Hasil Output SPSS_Uji Simultan (uji F).....	89
Lampiran 12 Surat E_Riset.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor. Fungsi pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara baik untuk membiayai pengeluaran negara maupun menata kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.¹ Penerimaan sektor pajak ini salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh). Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikelurkan undang-undang Nomor 06 Tahun 1983 Tanggal 31 Desember tentang ketentuan umum tata cara perpajakan.² Pemerintah terus berusaha untuk menaikan target penerimaan pajak hal ini yang dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan msyarakat dapat ditingkatkan. Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah penerimaan pajak.

Seringkali realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan meleset dari target penerimaannya. Pemerintah telah menetapkan target setiap tahunnya, akan tetapi penerimaannya seringkali gagal memenuhi target. Penetapan target tersebut juga ditimbang berdasarkan kebutuhan keuangan negara yang pembiayaannya berasal dari masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah pun melakukan reformasi pajak dengan harapan mampu menambah perolehan pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sektor ekonomi, penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2020-2021. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami pemulihan. Dalam laporan Manajer Riset CITA, ada tiga faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak membaik di tahun 2021. Adanya pemulihan ekonomi sepanjang 2021. Pada periode 2020 kondisi perekonomian tertekan karena adanya

¹ Agriyanto, R., Istiariyani, I., Ningsih, T.W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(2), 235-243.

² Simanjuntak, Imam, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak*, 2018 hl-1

penyebaran Covid-19. Berikut adalah grafik dan tabel penerimaan perpajakan nasional tahun 2020-2021:

**Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak
Tahun 2020-2021**



Data diperoleh dari Kemenkeu, diakses pada 08 Januari 2022

Penerimaan utama negara pada sektor perpajakan telah menunjukan peran yang semakin penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan sosial serta distribusi pendapatan yang adil dan merata diseluruh masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum.³ Menurut Hutagaol 2017 penerimaan pajak

³ Yoga Haqim Wiguna, 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak Terhadap penerimaan pajak ' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

merupakan sumber penerimaan yang dapat di peroleh yang dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah secara kodisi masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan berbagai kebijakan diantaranya kebijakan eksentifikasi wajib pajak dan intenfikasi pajak. Upaya tersebut disadari oleh meningkatnya dominasi RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Pajak merupakan anggaran terbesar dianggaran negara.

Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditingkatkannya pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mengingat hal ini merupakan faktor – faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak.⁴

Tabel 1.1
Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak KPP Semarang Barat

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaa Pajak	Persentase
1.	2020	1,826. 948. 813,258	1,659.058.462,163	0,177%
2.	2021	1,781.724.953,8021	1,272.985.201,446	0,518%
3.	2022	2,331. 817. 746, 114	1,181.947.423,520	1,159%

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat

Bedasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dan targetnya masih jauh dari perdiksi perkiraan. Diketahui jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 -2022 mengalami penurunan. Di tahun 2020 penerimaan pajak terealisasi Rp. 1,659 miliar. Di tahun 2021 penerimaan pajak terealisasi sebesar 1,27 miliar. Di tahun 2022 penerimaan pajak terealisasi 1,18 miliar. Kendala utama yang menyebabkan tidak tercapainya target perolehan penerimaan pajak kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang masih rendah. Terbukti banyak masyarakat yang masih terlambat membayar pajak. Dengan adanya penelitian ini agar peneriman pajak kedepannya mencapai target. Pemeriksaan dan penagihan pajak sedikit membantu

⁴ Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan PajakPratama Majalaya Tahun 2013-2016). Kajian Akuntansi, 19(2), 84–92.

agar penerimaan pajak pada tahun ini meningkat.⁵ Sumber penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti kepentingan rakyat Pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran bagi sebagainya. Dalam rangka mencapai itu semua pemerintah pembangunan nasional dan sumber penerimaan pajak.⁶ Alasan mengambil tempat objek penelitian di KPP Pratama Semarang Barat ini karena peneliti menemukan bahwa terdapat fenomena yang mana di Indonesia dalam undang-undang no 9 tahun 1994 diwajibkan kepada wajib pajak agar taat dan tepat waktu untuk membayar pajaknya. Tetapi kenyataannya atau realitanya masih banyak yang tidak taat akan pajaknya, dari hasil data penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang barat termasuk rendah dengan adanya variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan bahwa wajib pajak agar selalu tepat waktu untuk membayar pajak. Namun, perlu diingat bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dilakukan dengan cermat dan adil, menghindari dari tindakan yang dapat memicu resistensi atau ketidakpuasan di antara wajib pajak. Pemerintah juga harus berfokus pada penyederhanaan peraturan dan memberikan insentif yang mendorong keataatan pajak secara sukarela, bukan hanya mengandalkan penagihan pajak saja. Permasalahan sesuai dengan judul yang peneliti angkat selain itu didukung juga dengan data penelitian yang yang ditemukan dilapangan permasalahan yang peneliti temukan di lapangan ini juga dibahas sesuai dengan grand teori yang peneliti.

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpunkan mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁷

⁵ KPP Semarang Barat Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*, ed. by Suryadi Saat, 2014th edn (Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) .

⁶ Meidiansjah Azhar Wantasen *Penarimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Isentif PajakK Bagi Wajib Pajak yang Terdampak COVID-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pramata Manado*, (16(4), 2021, 387- 397).

⁷ Eka Sulistyorini, Nurul Latifah, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Setudy Kasus Permata Pati Tahun 2019*, Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, E-ISSN : 2829-1433 Website: ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena realisasinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan.⁸

Perlunya dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya penerimaan pajak karena pajak mampu mendapatkan penerimaan negara yang terbesar. Peran pajak akan semakin besar dimana yang akan datang karena tujuan dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan pajak membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.⁹

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2007 tentang penagihan pajak melalui surat tagihan pajak dengan surat ketetapan pajak dan UU No. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 Januari 2001. Hal ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan dari wajib pajak, meminimalisir

⁹ Anastasia Meiliawati, Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Kosambi Ultima Accounting Vol 5. No.1. Juni2013

adanya tax avoidance dan tax evasion, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat system pelaporan pajak yang tidak benar.¹⁰

Tindakan penagihan pajak juga dapat dilakukan sebagai salah satu cara pengoptimalkan penerimaan pajak yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yangmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Diupayakan agar setiap Wajib Pajak mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak setelah ditagih pun namun belum memenuhi penagihan pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhak menagih dengan Surat Paksa sesuai dengan hukum perpajakan. Dengan efektifnya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunannasional.¹¹

Berdasarkan fenomena diatas faktor pertama yang mempengaruhi penerimaan pajak yakni pemeriksaan pajak. Penerimaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

¹⁰ (Siti Kurnia, 2010hal 247

¹¹ Firdayani,SE, Dr. Paulus Kombo Allo Layuk,SE,.M.Si.,Ak.,CA, Theo Allolayuk,SE,.M.Si.,Ak, Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura) Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 12, Nomor 1, Mei 2017: 24–38

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).¹²

Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemeriksaan perpajakan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan pemotongan dan pemungutan serta penyeteroran pajak oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugasnya diperlukan keefektifan pelaksanaan pemeriksaan pajak dimana hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak selain dari pihak Wajib Pajak itu sendiri. Suatu sistem yang telah ada secara teoritis serta peraturan perpajakan yang berlaku haruslah sesuai dengan aplikasi yang ada dilapangan, jika suatu sistem dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka akan mewujudkan efektivitas pemeriksaan, karena dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus).¹³

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang dengan menegur atau mengingatkan, melaksana penyitaan, menjual barang yang telah disita (Diaz,2012). Semakin tinggi tingkat penagihan pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Subardjo 2019 serta Surnato 2018 mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan

¹² Mardya Fitrianiingsih. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jurnal Akuntansi

¹³ Arifaizha Mustakim Pakhi, Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan pajak Pretama Banteng. 2018 hal 1

pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Raulani 2020 dan mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.¹⁴

Permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pajak di KPP Semarang Barat ialah kendala Operasional Akibat Pandemi, Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi operasional pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pembatasan sosial, kerja dari rumah, dan penutupan kantor-kantor pajak dapat menghambat aktivitas pemeriksaan dan penagihan. Keterbatasan akses fisik dan teknologi dapat mengganggu proses pemeriksaan dan penagihan yang efektif. Pemerintah dapat melakukan penundaan atau penangguhan pemeriksaan pajak untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang terdampak. Hal ini dapat mengurangi jumlah pemeriksaan yang dilakukan dan menghambat proses penagihan. Kendala dalam pengumpulan data proses pemeriksaan dan penagihan pajak membutuhkan akses terhadap data dan informasi yang akurat dari wajib pajak. Ada kendala dalam pengumpulan data yang cukup lengkap dan tepat waktu, terutama dari sektor informal atau dari wajib pajak dengan kegiatan yang kompleks. Penghindaran Pajak dan ketidakpatuhan masalah penghindaran pajak dan ketidakpatuhan wajib pajak juga dapat mempengaruhi pemeriksaan dan penagihan pajak. Beberapa wajib pajak mungkin menggunakan praktik penghindaran pajak yang rumit atau tidak mematuhi ketentuan perpajakan, sehingga mempersulit proses pemeriksaan dan penagihan.¹⁵

Pada penelitian sebelumnya telah menemukan beberapa aspek yang berpengaruh pada penerimaan pajak. Penelitian Anam Hairul 2018 menyebutkan penerimaan pajak serta penagihan pajak berpengaruh positif signifikan pada penerimaan pajak, pihak djp melakukan pemeriksaan rutin dengan baik dan wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayarkan pajaknya maka bisa mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

¹² Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, Nurcahyono Nurcahyono,(*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>, ISSN : 2808-098X, E- ISSN : 2808-1234 Vol. 02 No. 02 (2022)) Hal: 01-13

¹⁵ Yoga Haqim Wiguna, 'Pengaruh pemeriksaan Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap penerimaan pajak ' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

Penelitian Afrina Setiawati 2017 menyebutkan variabel penagihan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.¹⁶ Penelitian Cut Inayatul Maulida 2017 menyebutkan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Banda Aceh. Ini disebabkan minimnya kesadaran wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya serta minimnya tindakan pemeriksaan pajak oleh pihak DJP, namun dari hasil uji simultan bahwa pemeriksaan serta penagihan pajak memiliki pengaruh secara simultan pada penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Banda Aceh. Menurut Parmono 2016 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penagihan pajak.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil tidak dapat konsistensi dalam hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, perlu adanya penelitian sejenis untuk memperluas riset terdahulu. Dengan mengkombinasikan variabel independen dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini mengambil variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Penelitian objektif yang akan dilakukan di KPP Semarang Barat dan tahun penelitian di tahun 2022 yang menjadi pembeda penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Penerimaan pajak merupakan variabel dependen dari penelitian ini, sedangkan independennya adalah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi hubungan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2022)”**.

¹⁶ Rizka Wahyuni Siregar, 'Pengaruh pemeriksa Pajak, Penagihan Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Sppt Terhadap Penerimaan Pajak Kota Pekanbaru', JOMFekom, 4.1 (2015), 843-57

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
2. Apakah penangihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP pratama Semarang Barat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pemeriksaan pajak apakah berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Diharapkan penelitian berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Syariah, khususnya berkaitan dengan Pengaruh Pemriksaan Pajak dan Penagihan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Serta, memperkuat hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh pada bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman baru untuk mengetahui, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pengalaman.

1.5 Sistematika Penulisan

Merupakan penggambaran kerangka penulisan yang akan lebih dijabarkan pada pembahasan selanjutnya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang mengenai pengambilan suatu topik dalam penelitian. Pembahasan ini berguna sebagai gambaran umum dari permasalahan penelitian. Selain latar belakang, pada bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta masalah dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merangkum teori dasar yang dipakai sebagai penguat argumen dalam penelitian sekaligus memberikan deskripsi dari setiap variabel independen dan variabel dependen. Adapun bagian lainnya, bab ini juga memuat referensi artikel jurnal terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan informasi atau pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya, seperti metode penelitian, ukuran sampel dan perhitungan ukuran sampel, definisi operasional variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyampaikan hasil analisis data setelah dilakukannya penelitian. Setelah analisis data menggunakan berbagai model regresi, kemudian dilakukan interpretasi hasil apakah hipotesis yang diajukan dinyatakan sebagai pernyataan yang dapat diterima atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini menjadi bagian final dari penelitian skripsi. Pada bab ini diuraikan inti dari penelitian serta saran-saran bagi pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh (Heider, 1958) seorang psikolog asal Jerman. Teori atribusi menjabarkan tentang proses bagaimana menentukan penyebab dan motif berbagai perilaku yang menimpa seseorang¹⁷. Teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang. Teori atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal seperti ciri kepribadian, kemampuan dan kesadaran.

Teori atribusi eksternal menyimpulkan bahwa adanya kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang. Teori atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal seperti adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang menentukan perilaku dalam memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak disebabkan oleh faktor eksternal dimana wajib pajak yang paham tentang manfaat pajak berarti sukarela dan tidak ada paksaan dalam membayar pajak sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali (Waluyo,

¹⁷ Darwati, teori atribusi, 2015

2009).¹⁸ Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Hukum Pajak Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapasiapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar. Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan (Adrian Sutedi, 2013). Adapun

2.2.1 Fungsi Pajak

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budger* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *reglarend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai

¹⁸ Muhammad Faiz, Rahayu Subekti, *Kendala Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

(PPN) dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.¹⁹

2. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:²⁰

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi, sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah tersebut.²¹
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dimaksudkan agar para pengusaha dapat memasarkan hasil produksinya ke pasar Dunia sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
- d. Pemberlakuan tax holday, hal ini dimaksudkan untuk menarik Investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.2 Jenis-Jenis pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.²²

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung: yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain Contoh: Pajak Penghasilan

¹⁹ Waluyo, "*Perpajakan Indonesia*", Salemba Empat Jakarta, 2019, h 3.

²⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (edisi 4), 2008, Jakarta: Salemba Empat, hal. 3

²¹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, hal.5

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 4

- b. Pajak Tidak langsung: yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
- c. Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formalyuridis diharuskan melunasi pajak.
- d. Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- e. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.²³

Jika ketiga unsur itu ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

Pajak Subjektif: yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

2.3 Pajak Dalam Islam

2.3.1 Pengertian Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang berarti, mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan dan lain-lain. Pajak (dharibah) adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata kerjanya (isim) dharibah yang dapat diartikan sebagai beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta

²³ Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 5

setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai beban pikul (pikulan yang benar).²⁴

Yusuf Qardhawi memberikan pengertian pajak yaitu, pajak iuran wajib berupa uang yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan, tanpa mendapatkan imbalan apapun dari negara. Pendapatan dari iuran ini digunakan untuk mendanai biaya umum dari berbagai sektor keuangan, sosial, politik, dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara .

Pengertian pajak menurut Gazi Inayah adalah kewajiban untuk membayar tunai sejumlah uang yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat dengan tidak ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan kepemilikan harta dan dialokasikan untuk memenuhi keperluan pangan secara umum dan untuk memenuhi kebutuhan politik keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Abdul Qadim Zalim pajak adalah harta kaum muslimin yang diwajibkan Allah Swt untuk dikeluarkan guna mendanai berbagai kebutuhan dan membiayai pos-pos pengeluaran yang wajib bagi mereka, dalam keadaan Baitul Mal tidak ada uang/ harta.²⁵

Kata “pajak” terdapat dalam Q.S Al-Taubah Ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا َ الْجِزْيَةَ عَن
يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :”pergilah orang-orang yang tidak beriman kepadaku Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka telah mengharamkan apa

²⁴ Maman Surahman dan Fadila Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2017. h 168-169

²⁵ Muhammad Fikri dan Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1, No. 2, h 27-28.

yang tidak diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Ayat diatas menjelaskan bahwa masyarakat diperintahkan untuk membayar pajak. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan memunggut pajak. Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah wajib menerapkan paak demi kemasalahatan bangsa.

2.4 Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara menyeluruh baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur.²⁶ Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.²⁷ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.²⁸

Peranan strategis dalam peningngkatan penerimaan pajak akan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dalam hal pembiayaan negara. Penerimaan negara yang potensial dapat dilihat dari ekonomi sektor pajak. Karena dengan melalui pajak, pemerintah dapat membiayai infrasstuktur di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi pembangunan.

²⁶ Suryadi & Subardjo, 2019

²⁷ Adang 2011

²⁸Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, Nurcahyono Nurcahyono,(*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>, ISSN : 2808-098X, E- ISSN : 2808-1234 Vol. 02 No. 02 (2022)) Hal: 01-13

Hampir sebagian besar wajib pajak terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk bantuan yang diterimanya dalam rangka pengisian SPT yang benar, lengkap, dan jelas akibat dari rumit dan kompleksitasnya peraturan UU perpajakan. Sebagaimana dalam firman Allah QS AL-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,

Hadis Nabi saw merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an¹. Hal ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa keharusan setiap Muslim dalam memahami ajaran Islam secara benar terkait permasalahan aqidah, ibadah dan muamalah, tidak saja merujuk kepada petunjuk al-Qur'an tetapi juga dari hadis Nabi saw.²⁹ Begitupun dalam penyelesaian perkara pajak yang kerap menimbulkan perdebatan dikalangan ulama klasik juga kontemporer. Hal ini dikarenakan hak kepemilikan dari setiap umat manusia merupakan salah satu objek yang sangat dilindungi oleh agama Islam, sebagaimana perlindungannya terhadap jiwa. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁹ Lihat Muhammadiyah Amin, Menembus Laylatu-l-Qada>r Perbedaan Interpretasi Hadis Tekstual dan Kontekstual., lihat pula, Ambo Asse, Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi saw. Makassar: Da>r al-Hikmah wa al-Ulum, 2010, h. 69.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan sukasama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.4.1 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Jhon, 2017 mengemukakan bahwa faktor yang berperan penting dalam menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui penerimaan pajak. Maka dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah target dan realisasi penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan menjawab semua pertanyaan, responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai.

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai variabel Penagihan Pajak :

1. Sumber utama penerimaan negara.
2. Peran penerimaan pajak.
3. Tujuan adanya penerimaan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah.
5. Peningkatan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

2.5 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo 2018 pemeriksaan pajak adalah serangkaian proses pencarian, pengumpulan, pengelolaan data dan atau alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Erart (2015) mengatakan bahwa alasan dilakukan pemeriksaan pajak adalah untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang sesuai dengan anggaran, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan keuangan, memastikan kebenaran SPT yang disampaikan oleh

wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, meningkatnya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, dan untuk memastikan bahwa jumlah yang harus dibayar disetorkan kepada pemerintah,. Pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.³⁰

2.5.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandiangan adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktunya yang telah ditetapkan;
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.

2.5.2 Jenis Pemeriksaan pajak

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan atau tahun-tahun sebelumnya).

³⁰ Suryo Prasetya Riyadi , Benny Setiawan , Dio Alfarago, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 8, No. 02, Desember 2021, hal 206-216. ISSN 2339-1545.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana.

2.5.3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khusus lain.

2.5.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Wati 2016 bahwa laporan pemeriksaan pajak adalah dasar untuk penciptakan suatu produk hukum tentang perpajakan yaitu surat ketetapan pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya surat ketetapan pajak.³¹ Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak pada suatu daerah. Dapat dilihat dari banyaknya SKPKB yang diterbitkan, maka dapat dinyatakan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak Marchlay 2013.³² Adapun indikator pemeriksaan pajak yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

³¹ Bunga Fitria Kusuma Wati, pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, 2016

³² *Marchlay 2013 pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.*

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan menjawab semua pertanyaan, responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai.

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai variabel pemeriksaan pajak:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Tujuan Pemeriksaan.
4. Keberatan pemeriksaan.
5. Pemeriksaan rutin.
6. Pemeriksaan khusus.
7. Pembinaan dan penyuluhan.

2.6 Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo 2009 Penagihan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang, penagihan pajak meliputi, kegiatan, perbuatan, pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, penyegahan, dan penyanderaan.³³ Menurut Waluyo 2000 “Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”.³⁴

Penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

³³ Madyosono . Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Akuntansi

³⁴ Arfaningsih Muhammad*Sunarto, *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA RABA BIMA TAHUN 2012-2015, AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 2NO. 1APRIL2018, p-ISSN: 2550-0376/ e-ISSN: 2549-9637/ DOI10.29230/ad.v2i1.2220.*

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.³⁵ Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang. Adapun dasar dalam penagihan pajak seperti dalam buku *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (DJP,2013)*.³⁶

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah : Surat Tagihan Pajak (STP); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding Banyak yang Menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Pasal 12 UU Pajak Bumi dan Bnagunan, dasar penagihan pajak adalah, Pajak Pemberitahuan Terutang SSPT; Surat Ketetapan Pajak; Surat Tagihan Pajak.³⁷

DJP pajak dapat dilakukan tindakan penagihan pajak jika jumlah pajak terutang tidak dibayarkan oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan UU yang ditetapkan.

2.6.1 Jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan 2 cara berikut ini:

1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelumnya tanggal jatuh tempo pemabayaran dari surat tagihan pajak, surat

³⁵ Pohan 2017 engaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Accounting*. Vol 20. No 20.

³⁶ Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia 2017.” Surat Edaran Direktu Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.”

³⁷ Hestin Sri Widiawati dan Eunike Rose Mita, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Kediri*zra Muda Sifrid S. Pangemanan Victorina Z. Tirayoh,(*Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Permata Bitung*, *Jurnal EMBA* 1 Vol.3 No.4 Desember 2019,) Hal. 1-12

ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang batang milik penanggung pajak.³⁸

Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dengan penyampaian surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. SPMP yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat Negara dan menjadi dasar bagi JSP untuk melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan apabila utang pajak tidak dilunasi

³⁸ Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan.³⁹

2.6.2 Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak pengertian utang pajak menurut Pasal 1 ayat 8 tentang undang-undang penagihan pajak sebagai berikut: utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Zulia dan Rukimi 2012 timbulnya hutang pajak disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- 1) Sejak dilahirakan
- 2) Sejak ada undang-undang
- 3) Sejak timbulnya surat ketetapan pajak.⁴⁰

2.6.3 Indikator penagihan pajak

Menurut Wati 2016 yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penagihan pajak adalah surat tagihan pajak yang merupakan media bagi wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban perpajakan berupa utang pajak. Semakin banyak penagihan di lakukan KPP, maka semakin banyak penerimaan pajak.⁴¹ Indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah jumlah surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh KPP.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan menjawab semua pertanyaan, responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai.

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai variabel Penagihan Pajak :

³⁹ Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Jurnal Ultima Accounting, vol 5 no 1.

⁴⁰ Zulia dan Rukimi 2012

⁴¹ Bunga Fitria Kusuma Wati, pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, 2016

1. Tunggakan pajak.
2. Surat ketetapan pajak.
3. Surat tagihan.
4. Surat teguran.
5. Surat paksa.
6. Penyitaan barang milik wajib pajak.
7. Pelelangan milik wajib pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Independen dan Dependen	Hasil
1	Sari Pani Asri Dinda, Restu Agusti, Al Azhar A (2021)	Pengaruh Self Assessment system, Pemeriksa Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)	X1 <i>Self Assessment system</i> X2 Pemeriksa Pajak X3 Penagihan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self Assessment system</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 2. Pemeriksa Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 3. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan

				terhadap penerimaan pajak.
2	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	X1 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak X2 Kegiatan Sosialisasi X3 Pamariksa Pajak Y Penerimaan Pajak	1. kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak 2. Kegiatan sosial berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
3	Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, Nurcahyono (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap	X1 Kesadaran Wajib Pajak X2 Kepatuhan Wajib Pajak X3 Penagihan Pajak X4 Pemeriksaan Pajak Y Penerimaan Pajak	1. Kesadaran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 2. kepatuhan wajib pajak tidak positif dan signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

		Penerimaan Pajak		3. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
4	Farida Khairani Lubis	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	X1 Surat Teguran X2 Surat Paksa Y Penerimaan Pajak	1. Surat teguran berpengaruh negatif terhadap penerimaan 2. Surat paksa mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak.
5	Budi Sutrisno Rina Arifati, Rita Andini (2019)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.	X1 Kewajiban kepemilikan NPWP X2 Pemeriksaan Pajak X3 Penagihan Pajak X4 Surat Paksa Pajak X5 Kesadaran Wajib Pajak Y penerimaan pajak	1. kewajiban NPWP berpengaruh positif dan signifikan antara kewajiban kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak. 2. pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan penerimaan pajak.

				<p>3. penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.</p> <p>4. Surat paksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.</p> <p>5. kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak</p>
6	Hairul Anam, Srie Hartutie, Moehadito Dirmayani (2018)	Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	X1 Kepatuhan wajib pajak X2 Pemeriksaan X3 Penagihan Y Penerimaan pajak	<p>1. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan</p>

				<p>terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan</p> <p>3. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan.</p>
7	Arfaningsih Muhammad, Sunarto	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	X1 Pemeriksaan Pajak X2 Penagihan Pajak X3 Kepatuhan Wajib Pajak Y Penerimaan Pajak	<p>1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak</p> <p>2. Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak</p> <p>3. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak</p>

8	Indira Mohamma, David P.E.Saeran, Sonny Pangerapan	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	X1 Pemeriksaan Pajak X2 Penagihan Pajak Y Penerimaan Pajak	1. Pemeriksaan Pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 2. Penagihan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
9	Ardiani Ika Sulistyawati Dian Indriana Tri Lestari Novi Widi Tiandari (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	X1 Kesadaran Wajib Pajak X2 Pelayanan Perpajakan X3 Kepatuhan Wajib Pajak Y Penerimaan Pajak	3. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak 4. Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. 5. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan

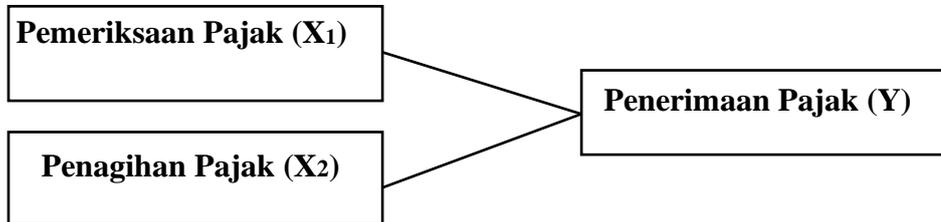
				terhadap kinerja penerimaan pajak.
10	Anastasia Meiliawati (2019)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi	X1 Pemeriksaan X2 Penagihan Pajak Y Penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak. 2. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
11	Tjokorda Gde Anggadhika Widya Pramana Putra (2021)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	X1 Penagihan Pajak X2 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak X3 Kesadaran Wajib Pajak Y Penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak 2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

				3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
12	Satriawaty Migang (2020)	Pengaruh Pertumguhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	X1 Pertumguhan Self Assessment System X2 Pemeriksaan Pajak X3 Penagihan Pajak Y Penerimaan Pajak	1. Pertumguhan Self Assessment System Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak 3. Penagihan Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak

13	Eka Sulistyorini, Nurul Latifah (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)	X1 Pemeriksaan Pajak X2 Penagihan Pajak Y Penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak . 2. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
14	Ayang Maulana, Taufik Hidayat	Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	X1 Penagihan Pajak X2 Kepatuhan wajib Pajak X3 Pemeriksaan Pajak Y Penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap

				Penerimaan Pajak.
15	One Yantri (2023)	Pengaruh Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Batam Selatan	X1 Kewajiban kepemilikan NPWP X2 Pemeriksaan Pajak X3 Penagihan Pajak Y Penerimaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. 3. Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap dan positif terhadap Penerimaan Pajak.

2.8 Kerangka Berfikir



Keterangan:

Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu penerimaan pajak

X1 : Variabel independen pertama yaitu pemeriksaan pajak

X2 : Variabel independen kedua yaitu Penagihan Pajak

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Hipotesis Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku diikuti dengan melakukan penilaian yang objektif dan profesional terhadap data, informasi, dan catatan lain yang relevan. Ketika sistem self-assessment diberlakukan, partisipasi dan candor wajib pajak menjadi krusial. Karena itu, KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat mempercayai bahwa semua kewajiban perpajakan akan dipenuhi melalui mekanisme ini. DJP harus terus memberikan saran dan pengawasan wajib pajak, termasuk pemeriksaan pajak, karena bahaya yang melekat pada perekonomian.⁴² Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan. Adapun

⁴² Muhammad Bagus, Nuramalia Hasanah, PENGARUH INSENTIF PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA KEMBANGAN JAKARTA BARAT 2019 – 2021, Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Vol. 3, No. 3, Desember 2022, 766-780

faktor yang dapat mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu penggelapan pajak.⁴³

Teori atribusi relevan dengan variabel ini. Dalam teori atribusi untuk menentukan perilaku wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku sesuai dengan penagihan pajak, penagihan pajak yang dilakukan secara optimal akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, dengan dilakukannya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Siti Kurnia Rahayu 2017 di dalam bukunya pemeriksaan pajak mencegah seseorang berbuat curang dalam melaporkan pajak, baik wajib pajak yang diperiksa sendiri atau wajib pajak lainnya, sehingga di harapkan penerimaan pajak untuk tahun ketahun mendatang menjadi lebih baik. Penelitian Zeny, Fadjar, Djoko (2019), Meidhawati, Andi, Susanto, and Wadi, Ali Akbar (2022) Jelas bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi terhadap penerimaan Pajak karena tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu yang penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Studi Goshu Desalegn (2020) menemukan bahwa pemeriksaan pajak dapat memengaruhi penerimaan pajak. Hipotesis studi baru ini didasarkan pada studi sebelumnya. Berdasarkan kerangka penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

⁴³ Waluyo, 2013 hal 65

2.9.2 Hipotesis Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang dimulai dengan tindakan-tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi.⁴⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tujuan penagihan pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.⁴⁵

Teori atribusi relevan dengan variabel ini, karena menentukan penagihan pajak yang dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Menurut teori atribusi, penagihan pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak dilakukan secara optimal meningkatkan pengetahuan masyarakat, dengan adanya penagihan pajak wajib pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan karena adanya pengetahuan mengenai pajak. Sehingga dengan dilakukannya penagihan pajak yang akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Di dalam penelitian Indira Mohammad, David Saerang dan Sonny Pangerapan menunjukkan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado karena Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka semakin tinggi tingkat penagihan pajak semakin tinggi tingkat

⁴⁴ Martalita Arti Hidayah and Bambang Suryono, 'Pengaruh pemeriksaan pajak, Penengihan pajak, Terhadap Penerimaan Pajak ', 11.11 (2022).

⁴⁵ Idzni Widiarti Agustin, Yeti Apriliawati, and Arry Irawan, 'Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Bandung', *Indonesian Accounting Research Journal*, 1.2 (2021), 271–79.

penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu di dalam bukunya (2017) bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan melaksanakan Penagihan Pajak yang dilakukan baik secara pasif maupun aktif oleh DJP dengan harapan terealisasinya penerimaan pajak. Berdasarkan kerangka penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁴⁶ Yang mana penelitian lapangan ini dilakukan kepada pegawai KPP Semarang Barat. Untuk metode penelitiannya adalah metode kuantitatif yang menekankan pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah ke dalam statistika. Menurut Sugiono 2010, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivisme (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.⁴⁷

3.1.2 Sumber Data

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor KPP Semarang Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumber informasi dengan penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pajak di KPP Semarang Barat. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah seperti data yang diperoleh oleh buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

⁴⁶ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 116.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, serta ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi seluruh perhatian.⁴⁸ Populasi pada penelitian ini adalah pegawai dari KPP Semarang Barat yang memiliki jumlah 120 populasi.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian dengan jumlah populasi yang besar tidak mungkin peneliti dapat mempelajari seluruh populasi dikarenakan keterbatasan biaya, tenaga, waktu dan lain-lain, sehingga dalam kondisi seperti ini dilakukan dengan meneliti sebagian saja dari populasi sebagai sampel.⁴⁹

Menurut Sugiyono 2017 definisi *non probability sampling* adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* atau sering disebut juga *sensus*. Menurut Sugiyono 2017 pengertian dari *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesamaan yang sangat kecil. Istilah ini sampel jenuh adalah *sensus* dimana semua populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan/petugas pajak di KPP Semarang Barat terletak di Jl. Pemuda No.1, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50173 yang berjumlah 120 karyawan diseluruh divisi yang akan dijadikan responden penelitian ini.

⁴⁸ Suharyadi, dkk. Statistika, Jakarta, Salemba Empat, 2009, hal 7

⁴⁹ Lijian P.Sinambela, h 166

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah serta tujuan yang diteliti.⁵⁰ Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada orang/objek yang dijadikan responden dalam penelitian. Proses pengambilan data ini dilakukan peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan peneliti memberikan alternatif jawaban yang mana untuk memudahkan peneliti untuk menjawab. Dalam penelitian ini responden yang dijadikan dalam penelitian adalah pegawai KPP Semarang. Penyebaran kuesioner ini disebar secara langsung untuk mendapatkan datanya setelah itu, data tersebut akan diuji dengan menggunakan uji validitas, uji reabilitas, dan uji analisis data.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek penelitian (individu/kegiatan) yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya.⁵¹ Yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan variabel sebagai berikut:

A. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.⁵² Variabel terikat di dalam penelitian penerimaan pajak

B. Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian adalah Pemeriksaan (X1) dan Penagihan Pajak (X2).

⁵⁰ Hermawan, Asep. Penelitian Bisnis, Grasindo, hal 168.

⁵¹ Nilda Miftahul Janna, "Variabel dan Skala Pengukuran Statistik", h. 2.

⁵² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian, Yogyakarta: V Andi Offset, 2010, h.133.

3.4.2 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang-pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Peneliti menggunakan skala likert, dengan bobot dan kategori rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Bobot dan Kategori skala likert

NO	Jenis Jawaban Responden	Bobot
1	SANGAT SETUJU (SS)	4
2	SETUJU (S)	3
3	TIDAK SETUJU (TS)	2
4	SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	1

Tabel 3.2 Variabel, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pemeriksaan pajak	Menurut Priantara, Diaz (2011) Pemeriksaan Pajak adalah merupakan ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self asesment yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. 2. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 3. Tujuan Pemeriksaan 4. Keberatan pemeriksaan 5. Pemeriksaan rutin. 6. Pemeriksaan khusus 7. Pembinaan dan penyuluhan 	<i>Skala likert</i>

	<p>memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Oktaviani (2007), pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seseorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.</p>	(Wati, 2016)	
Penagihan Pajak	Menurut Mardiasmo (2009) Penagihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunggakan pajak. 2. Surat ketetapan pajak. 	

	<p>Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang, penagihan pajak meliputi, kegiatan, perbuatan, pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, penyegahan, dan penyanderaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat tagihan. 4. Surat teguran. 5. Surat paksa. 6. Penyitaan barang milik wajib pajak. 7. Pelelangan milik wajib pajak. <p>(Wati, 2016)</p>	<p><i>Skala likert</i></p>
<p>Penerimaan Pajak</p>	<p>Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber utama pendapatan negara. 2. Peran penerimaan pajak. 3. Tujuan adanya penerimaan pajak. 4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah. 	<p><i>Skala likert</i></p>

	keadilan sosial (Adang, 2011).	5. Peningkatan penerimaan pajak dimasa yang akan datang. (Jhon,2017)	
--	-----------------------------------	---	--

3.5 Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, yang mana analisis ini nantinya berguna untuk mengetahui jawaban pasti dari permasalahan yang telah dirumuskan di bab awal, serta bermanfaat untuk pengujian hipotesis. Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, dengan menggunakan model regresi linear berganda dan perhitungan statistik menggunakan bantuan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service*). Pengertian model regresi linier berganda adalah, suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas/ *predictor* (X_1, X_2, \dots, X_n) dan satu variabel tak bebas/ *response* (Y).⁵³ Di penelitian ini analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh X_1 dan X_2 terhadap (Y) dengan model persamaan sebagai berikut (Ghozali).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

⁵³ Made Yuliara, *Modul Regresi Linear Berganda*, Bali: Universitas Udayana, 2016, h. 2.

Keterangan:

Y	= nilai yang diramalkan
α	= konstanta
b1	= koefisien regresi
b2	= koefisien regresi
X1	= Pemeriksaan pajak
X2	= Penagihan pajak
e	= error/variabel pengganggu

3.6 Uji Intrusmen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Menurut pendapat Ghozali, uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *product moment pearson*, yaitu mengkorelasikan setiap pertanyaan dengan skor total. Menurut Sugiono 2011 suatu indikator di katakan valid, apabila $n = 100$ dan $\alpha = 0,05$, maka $r_{tabel} = 0,195$ dengan ketentuan:

1. Hasil *rhitung* > $r_{tabel} (0,195)$ = valid
2. Hasil *rhitung* < $r_{tabel} (0,195)$ = tidak valid

3.6.2 Uji Realiabilitas

Uji reabilitas yaitu suatu pengukuran data yang bertujuan untuk kestabilan serta konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan yang telah di sajikan dalam bentuk kuesioner. ⁵⁴Dalam uji reabilitas, kuesioner dikatakan reliable jika jawaban kuesioner konsisten dalam masa ke masa. Sehingga uji reabilitas ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang mempunyai indikator

⁵⁴ Tim Penyusun di Fakultas dan Manajemen, Modul Praktikum: Metode Riset Untuk Bisnis dan Manajemen, Badan Penerbit Utama Universitas Widyatama, 2007 hal 24.

dari variabel. Di dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan *Alpha Cronbach*.⁵⁵ Menurut Priyanto 2013, kriteria variabel menggunakan *Alpha Cronbach* reliabel apabila:

1. Hasil $\alpha \geq 0,06$ = reliabel
2. Hasil $\alpha \leq 0,06$ = tidak reliabel

3.6.3 Uji asumsi klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu sebuah perhitungan data yang bertujuan untuk menguji atau menilai sebaran data pada suatu kelompok atau variabel. Selain itu uji normalitas juga digunakan untuk menentukan data yang diambil dari populasi normal. Dalam uji T dan F diasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik.

Dalam uji normalitas analisis grafik, normalitas dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residunya. Pertimbangan ini berdasarkan sebagai berikut: a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogram maka hal ini menunjukkan distribusi normal. Sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. b. Sebaliknya, jika data atau grafik menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram maka tidak menunjukkan distribusi normal. Sehingga model regresinya tidak memenuhi asumsi normalitas.⁵⁶

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas yaitu perhitungan data yang bertujuan untuk memastikan apakah dalam sebuah data ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya dalam model regresi.

⁵⁵ Priyanto 2013

⁵⁶ Santoso, Statistika Hospital, Sleman, CV Budi Utama, 2018, hal 187.

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antarvariabel independen (IV) pada model regresi. Dalam uji multikolinieritas, korelasi antar variabel independen (IV) sebaiknya kecil. Dalam uji multikolinieritas, pendeteksian dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance serta VIF. Semakin kecil nilai tolerance serta besar VIF maka mendekati multikolinieritas.⁵⁷

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu perhitungan data yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari semua pengamatan dari regresi linier. Uji ini merupakan uji homoskedastisitas, yang mana apabila ada keadaan yang ada ketidaksamaan varian dari error pada setiap pengamatan variabel bebas pada regresi. Uji ini harus ada pada uji asumsi klasik. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka regresi dianggap tidak valid.

Pada uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan grafik scatter plot antar variabel terikat ZPRED dengan SRESID. Selain menggunakan scatter plot uji ini bisa dilakukan dengan Glejse. Uji Glejser digunakan untuk melihat apabila tingkat kepercayaan diatas 5%, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.⁵⁸

3.6.4 Analisa Regresi

Analisis regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada akhir abad ke-19 saat melakukan studi mengenai hubungan tinggi badan ayah dan anak. Konsep dasar regresi yaitu segala sesuatu memiliki keterkaitan dengan kondisi awal. Tujuan analisis regresi yaitu untuk mengukur keterkaitan antara variabel dependen dan independen serta untuk menunjukkan arah dari kedua variabel tersebut.⁵⁹ Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis regresi adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Nisfiannoor, Muhammad. Pendekatan Statistika Modern, Jakarta, Salemba Humaika, 2009, hal 92.

⁵⁸ Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS21 Update PLS Regresi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, hal 54

⁵⁹ Wibisono, Dermawan. Riset Bisnis, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal 164

3.6.4.1 Analisis Regresi linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu uji regresi yang jumlah variabel bebas terdiri lebih dari satu dengan variabel terikat. Dengan kata lain, variabel dependen (Y) dihubungkan dengan variabel independen (X) lebih dari satu dengan syarat variabel independen uji regresi linier berganda tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti oleh uji yang lain yang saling mendukung dan berhubungan.⁶⁰Rumus analisis regresi linier berganda adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

e : Error Estimated

Y : Penagihan Pajak

X1 : Pemeriksaan Pajak

X2 : Penagihan Pajak

3.6.4.2 Koefisien Determinan (R²)

koefisien determinan yaitu pengukuran yang digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan semua variabel bebas (variabel independen) dalam menjelaskan variabel terikat (variabel dependen). Semakin besar nilai R², semakin baik mencerminkan bahwa semakin besar presentase kontribusi nilai dari variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hal ini tidak menambah kesempurnaan sebuah model dalam penelitian karena hal ini berdasarkan dengan penambahan variabel. Semakin banyak variabel bebas (variabel independen) maka koefisien determinan (R²) semakin besar.⁶¹

⁶⁰ Rianto, Slamet, dkk. Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Sleman, Deepubliser, 2020, hal 137.

⁶¹ Seran, Sirilius. Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial, Sleman, CV. Budi Utama, 2020, hal 190

3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) yaitu teknik perhitungan yang digunakan untuk menguji hubungan simultan terhadap semua variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Dalam perhitungan uji statistik F terdapat dua macam perhitungan yaitu uji F dengan membandingkan uji F-tabel dan Uji F-hitung yang mana F-tabel diperoleh dari tabel F berdasarkan derajat kebebasan (dk) dan alfa. Perhitungan Uji F kedua yaitu dengan menggunakan nilai F dan nilai signifikansi sebesar 5%.⁶²

3.6.4.4 Uji Statistik t

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) yaitu uji perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (variabel independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel dependen). Perhitungan uji ini dilihat dari jumlah degree of freedom dengan derajat kepercayaan 5%. Maka apabila nilai signifikansi dibawah 0,005 hipotesis penelitian ditolak. Selain itu, uji signifikansi parameter individual dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t-hitung dengan nilai t-tabel.⁶³

⁶² Sirilius Seran... hal 188

⁶³ Imam Ghozali... hal 99

BAB IV

ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

KPP Pratama Semarang Barat terbentuk dan mulai beroperasi tanggal 6 Nopember 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-141/PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data wilayah yang diperoleh dari BPS Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, luas wilayah kerja KPP Pratama Secara geografis wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat berada bagian barat dan utara Kota Semarang dengan bentuk permukaan bumi yang bervariasi yang terdiri atas pegunungan, dataran rendah dan daerah pantai. Pengklasifikasian berdasarkan lapangan usaha dapat diketahui bahwa sektor yang mendominasi penerimaan pajak adalah Perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Property, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan

Apabila dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat maka terlihat bahwa sektor-sektor yang dominan seperti Sektor Perdagangan, dan industri masih sangat potensial di masa yang akan datang meskipun sebagian besar wilayahnya masih berupa lahan pekarangan dan perkebunan serta tambak. Penggalan di sektor pertambangan dan Penggalan yang menjadi sektor terendah penyumbang pajak perlu dilakukan intensifikasi.

4.1.2 Visi, Misi dan Lokasi KPP Pratama Semarang Barat

4.1.3 Visi KPP Pratama Semarang Barat

Menjadi KPP yang menyelenggarakan pelayanan prima dan menjaga penerimaan negara.

4.1.4 Misi KPP Pratama Semarang Barat

1. Memberikan pelayanan yang berimbang
2. Menghimpun pajak dengan segenap tenaga, pikiran dan budi luhur

4.1.5 Lokasi dan Wilayah KPP Pratama Semarang Barat

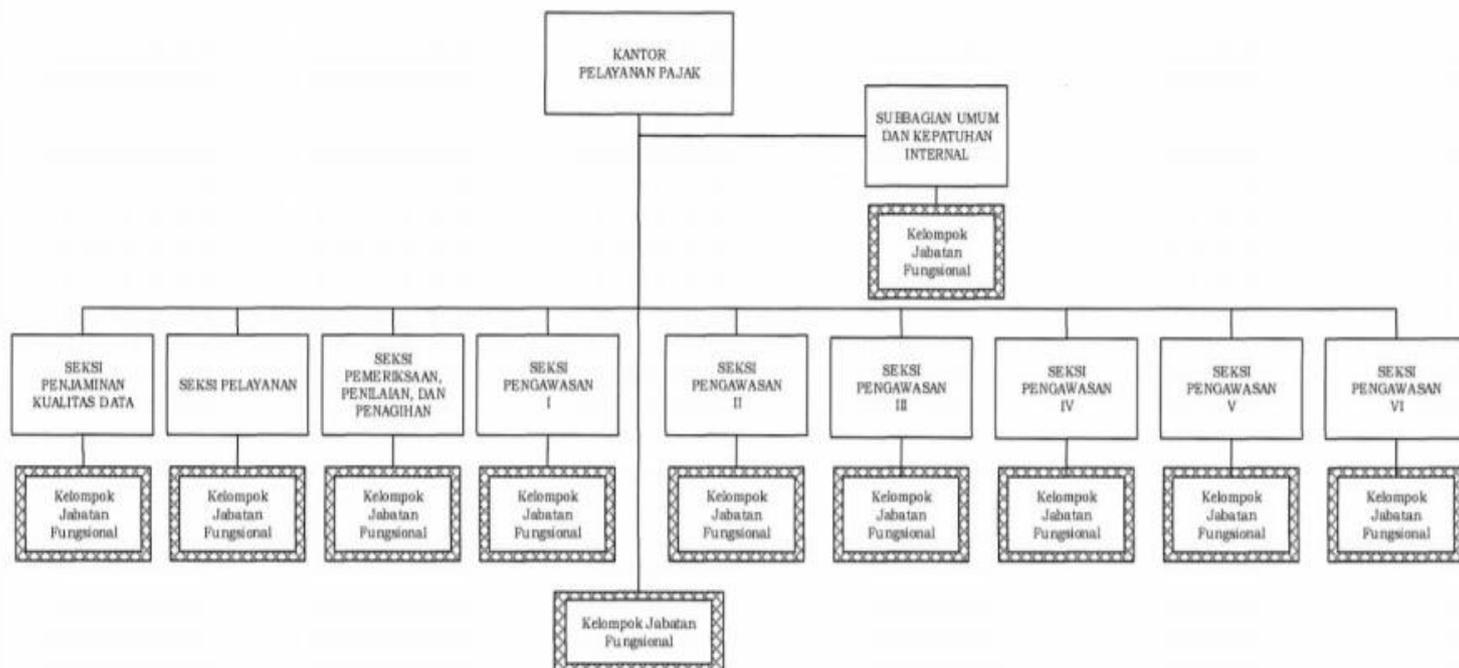
Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terletak di Jalan Pemuda Nomor 1 Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. **Kepala KPP Pratama : Nyoto Subekti**

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

Sumber : PMK nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pratma Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kelompok I)



4.2 Pengujian dan Hasil Data

Pengambilan sampel dalam riset ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Sebanyak 120 sampel diperlukan guna menguji hipotesis dalam riset ini. Sebelumnya uji instrument telah dilakukan dengan mengambil sebanyak 20 sampel karyawan KPP Pratama Semarang Barat dari 120 sampel yang diperlukan. Setelah instrumen diuji dan menghasilkan data yang valid dan reliabel, tahap selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner yang kedua untuk melengkapi 120 sampel yang diperlukan. Variabel bebas yang dipakai dalam riset ini adalah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Sedangkan penerimaan pajak sebagai variabel terikat.

Dalam penelitian ini untuk membantu memahami temuan penelitian, kepribadian responden diperlukan untuk memberikan gambaran situasi responden sebagai sumber

informasi tambahan. Dalam situasi ini, pendeskripsian data digunakan untuk menilik profil responden dan menganalisis korelasi antar variabel penelitian. Karakteristik penelitian tersebut meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja, dan penghasilan responden. Uraian berikut berasal dari penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden dan didapat gambaran sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Bersandarkan informasi yang didapat dari pembagian kuesioner pada karyawan KPP Pratama Semarang Barat, ada dua pengkategorian jenis kelamin responden, yaitu laki-laki dan perempuan dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
Laki-laki	51	51%
Perempuan	69	69%
Total	120	120%

Tabel 4.1 memperlihatkan karyawan KPP Pratama Semarang Barat pajak yang bergender laki-laki dalam penelitian ini sebanyak 51 orang dengan persentase sebesar 51%, sedangkan karyawan KPP Pratama Semarang Barat bergender perempuan sejumlah 69 orang dengan persentase 69%.

4.2.2 Usia Responden

Dalam kuesioner penelitian, batasan usia responden terbagi menjadi 3 kategori yaitu, kategori usia 20-30 tahun, usia 40-60 tahun, dan usia 60 tahun keatas. Informasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Berdasarkan Usia

Usia	Responden	Persentase
20-30 th	42	42%
40-60 th	77	77%
>60 th	1	1%
Total	120	120%

Berdasarkan tabel dalam penelitian ini karyawan KPP Pratama Semarang Barat dengan usia 20 sampai 30 tahun diketahui berjumlah 42 responden dengan persentase sebesar 42%. Ada 77 responden atau sebesar 77% merupakan karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang berusia antara 40 sampai 59 tahun. Kemudian ada 1 responden yang berusia lebih dari 60 tahun dengan persentase sebesar 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata usia karyawan KPP Pratama Semarang Barat dominan antara usia 20 sampai dengan 30 tahun.

4.2.3 Pendidikan Respoden

Dalam kuesioner penelitian, data pendidikan terakhir responden dibagi menjadi enam kategori dalam angket penelitian, yaitu; SMA, D1-D3, S1-S3, dan alternatif lain untuk jenjang pendidikan yang lain. Perolehan informasi dari penelitian ini diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Responden	Persentase
SMA	11	11%
D1-D3	19	19%
S1-S3	90	90%
Total	120	120%

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, terlihat bahwa 11 responden dengan presentase sebesar 11% dalam survei ini merupakan tamatan pendidikan SMA. Jumlah karyawan KPP Pratama Semarang Barat dengan tamatan pendidikan D1-D3 sebesar 19 responden dengan persentase senilai 19%. Karyawan KPP Pratama Semarang Barat dengan tamatan pendidikan S1-S3 sebanyak 90 responden dengan tingkat persentase sebesar 90%.

4.2.4 Lama Bekerja Responden

Dalam kuesioner penelitian ini informasi tentang lam bekerjanya responden mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka rincian jenis profesi ada dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Klasifikasi Berdasarkan lama Bekerjaan

Lama Bekerja	Responden	Persentase
1 – 2 Tahun	31	31%
3 – 4 Tahun	28	28%
5 Tahun	54	54%
19 Tahun	1	1%
6 Bulan	2	2%
12 Tahun	1	1%
25Tahun	1	1%
TOTAL	120	120%

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persentase karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang lama bekerja selama 1-2 tahun adalah 31% atau 31 responden. Persentase karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang lama bekerja selama 3-4 tahun responden dengan persentase sebesar 28%. Persentase karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang lama bekerja selama 5 tahun 54 responden dengan tingkat persentase sebesar 54%. Persentase karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang lama bekerja 19 tahun 1 responden dengan persentase sebesar 1%. Persentase

karyawan KPP Pratama Semarang Barat 6 bulan bekerja 2% dengan 2 responden. Persentase karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang lama bekerja selama 12 tahun 1 responden dan tingkat persentase 1%. Persentase karyawan KPP Pratama Semarang Barat yang lama bekerja selama 25 tahun 1 responden dan tingkat persentase 1%.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan dari data yang didapat sebagaimana adanya, analisis statistik deskriptif digunakan ketika akan menentukan secara lugas arti dari setiap variabel berupa mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menilai jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak Hasilnya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Penerimaan Pajak	120	15	5	20	17,44	2,573	6,618
Pemeriksaan Pajak	120	21	7	28	23,44	3,348	11,207
Penagihan Pajak	120	17	11	28	24,17	3,492	12,196
Valid N (listwise)	120						

Sumber : diolah dengan SPSS 16

Dari tabel 4.5, berikut ini adalah penjelasan rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel: a. Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel Penerimaan pajak menunjukkan nilai mean sebesar 17,44, standar deviasi sebesar 2,573, nilai variance sebesar 6,618, rangenya sebesar 15, nilai maksimumnya sebesar 20, dan nilai minimumnya sebesar 5.

b. Pemeriksaan Pajak (X1)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel pemeriksaan pajak menunjukkan nilai meannya sebesar 23,44, standar deviasi sebesar 3,348, nilai variance sebesar 11,207, rangenya sebesar 21, nilai maksimumnya sebesar 28, dan nilai minimumnya sebesar 7,00.

c. Penagihan Pajak (X2)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel tingkat Penagihan Pajak menunjukkan nilai meannya sebesar 24,17, standar deviasi sebesar 3,492, nilai variance sebesar 12,196, rangenya sebesar 17, nilai maksimumnya sebesar 28, dan nilai minimumnya sebesar 11.

4.4 Pengelohan Data dan Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Untuk jumlah responden (n) = 120 orang, dan untuk *deegree of freedom* (df) = n-2, maka df = 120 – 2 adalah 118. Sehingga dapat diperoleh r tabel sebesar 0.179, jadi nilai r hitung masing-masing dari pernyataan harus > 0.179 dan itu baru bisa dikatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas menggunakan SPSS 16, dapat diketahui bahwa 19 pernyataan pada penelitian ini valid, berikut adalah hasil uji validitas dari penelitian ini:

Tabel 4.6 Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	X1.1	0,448	0,179	Valid
	X1.2	0,516	0,179	Valid
	X1.3	0,562	0,179	Valid
	X1.4	0,450	0,179	Valid
	X1.5	0,580	0,179	Valid
	X1.6	0,460	0,179	Valid
	X1.7	0,497	0,179	Valid
Penagihan Pajak	X2.1	0,572	0,196	Valid

	X2.2	0,592	0,179	Valid
	X2.3	0,683	0,179	Valid
	X2.4	0,637	0,179	Valid
	X2.5	0,642	0,179	Valid
	X2.6	0,612	0,179	Valid
	X2.7	0,623	0,179	Valid
Penerimaan Pajak	Y.1	0,624	0,179	Valid
	Y.2	0,596	0,179	Valid
	Y.3	0,463	0,179	Valid
	Y.4	0,664	0,179	Valid
	Y.5	0,664	0,179	Valid

Sumber : diolah dengan SPSS 16

4.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Priyanto, kriteria variabel menggunakan *Alpha Cronbach's* reabel apabila angka yang ditetapkan lebih besar 0.60 (>0.60). Berikut adalah uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

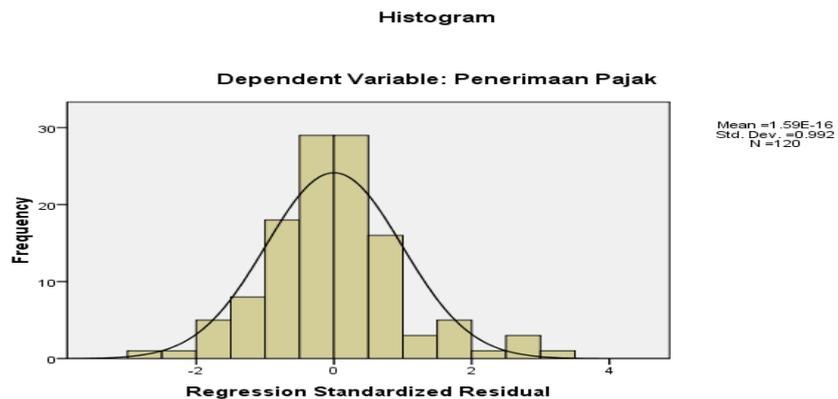
Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient</i>	Keterangan
Penerimaan Pajak	0,704	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,875	Reliabel
Penagihan Pajak	0,806	Reliabel

Sumber : diolah dengan SPSS 16

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Gambar 4 Uji Normalitas



Sumber : diolah dengan SPSS 16

Gambar di atas menandakan bahwa data di dalam penelitian terdistribusi dengan normal. Hal ini diperkuat dengan histogram di bawah ini:

Tabel 4.8 Uji Normalitas

Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	17,4416667
	Std. Deviation	2,06995686
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,145
	Negative	,114
Kolmogorov-Smirnov Z		-,145
		1,589

Asymp. Sig. (2-tailed)	,013
------------------------	------

Sumber : diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi uji normalitas dalam penelitian ini adalah 0.013 yang artinya lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai tolerance >0.100 dan nilai VIF <10.00 , maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut adalah uji multikolinearitas menggunakan SPSS 16:

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

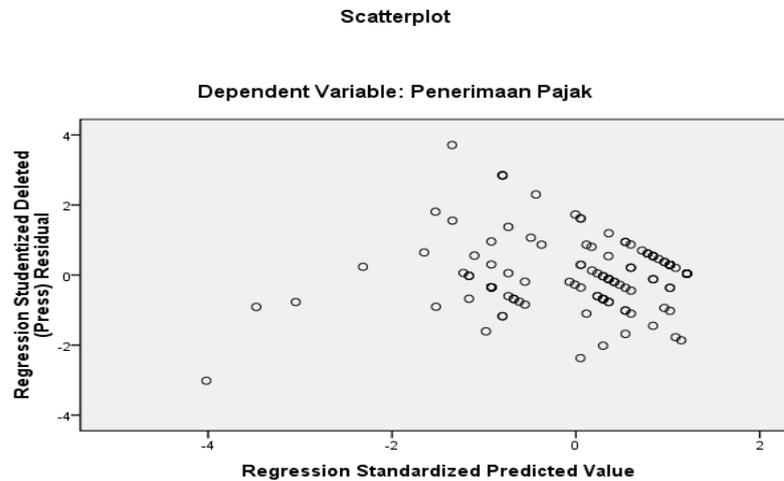
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemeriksaan Pajak	,521	1,919
Penagihan Pajak	,521	1,919

Sumber : diolah dengan SPSS 16

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada gambar di bawah ini menggunakan grafik Scatter Plot.

Gambar 4.3 Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat pada titik-titik yang menyebar di atas dan juga di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak ada pola yang jelas, maka dapat diartikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak sebagai X1, dan pengaruh penagihan pajak sebagai X2 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat mengetahui sebesar apa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah uji regresi linear berganda menggunakan SPSS 16:

4.10 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,982	1,078		2,161	0,033
Pemeriksaan Pajak	0,127	0,058	0,165	2,173	0,032
Penagihan Pajak	0,502	0,056	0,681	8,960	0,000

Sumber : diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat konstanta (nilai α) sebesar 2,982 dan untuk X1 (nilai β) sebesar 0,127 sedangkan untuk X2 (nilai β) sebesar 0,502. sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.982 - 0,127 X1 - 0,502X2 + e$$

Yang berarti:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2.982 artinya jika variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak bernilai 0 atau belum dipengaruhi oleh variabel Y, maka variabel X1 dan X2 tidak mengalami perubahan.
2. Nilai X1 diketahui sebesar 0,127. maksudnya, apabila pemeriksaan dinaikkan sebesar 0,01 satuan, maka akan terdapat kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,127 di KPP Pratama Semarang Barat.

3. Nilai X² diketahui sebesar 0.502. maksudnya, apabila penagihan pajak dinaikkan sebesar 0,01 satuan, maka akan terdapat kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,502 di KPP Semarang Barat.

4.6.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Untuk memastikan bagaimana setiap variabel independen (parsial) berhubungan dengan variabel dependen, maka dilakukan uji koefisien regresi parsial atau uji t statistik. Uji ini dilakukan untuk menentukan kebenaran suatu hipotesis penelitian. Variabel independen dikatakan memiliki efek pada variabel dependen jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 dan nilai t hitung melebihi nilai t tabel. Dasar pengambilan keputusannya, yakni:

1. Apabila nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 atau t_{hitung} melebihi t_{tabel} , maka terjadi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 atau t_{hitung} lebih rendah dari t_{tabel} , maka variabel independen tidak memiliki dampak pada variabel dependen.

Untuk menentukan t_{tabel} menggunakan rumus $df = n - k$, dimana n adalah jumlah data dan k adalah variabel riabel bebas. Jadi $df = 120 - 3 = 117$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,980.

Tabel 4.7 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.330	1.078		1	(Constan
Pemeriksaan Pajak	.127	.058	.165	2.173	Pemeriksa an Pajak
Penagihan Pajak	.502	.056	.681	8.960	Penagihan Pajak

Sumber : diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dapat dilihat bahwa t hitung variabel X1 sebagai variabel Pemeriksaan pajak sebesar 2.173. sedangkan distribusi t dicari dengan $(\alpha) = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $(n-k)$ atau $120-3 = 117$, maka nilai t tabelnya adalah 1.980. Apabila angka ini dibandingkan dengan angka t hitung ($2.173 > 1.980$), serta nilai signifikannya $0.032 < 0.05$, maka H1 diterima yang mana artinya Pemeriksaan pajak menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

2. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Dilihat bahwa t hitung variabel X2 sebagai variabel Penagihan pajak sebesar 8.960. sedangkan distribusi t dicari dengan $(\alpha) = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $(n-k)$ atau $120-3 = 117$, maka nilai t tabelnya adalah 1.980. Apabila angka ini dibandingkan dengan angka t hitung ($8.960 > 1.980$), serta nilai signifikannya $0.000 < 0.05$, maka H2 yang mana artinya penagihan pajak menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan pajak di KPP pratama Semarang Barat.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam model regresi ini, dilakukan uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.647	.641	1.541

Sumber : diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:

- a. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.805, yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak (Independen) dengan variabel Y penerimaan pajak (dependen) karena angka tersebut mendekati angka 1.
- b. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.641 atau 64.1% yang mana artinya variabel penerimaan pajak bisa dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebesar 64.1% dan untuk sisanya 31.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

4.6.4 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	509.882	2	254.941	107.407	.000 ^a
	Residual	277.710	117	2.374		
	Total	787.592	119			

Sumber : diolah dengan SPSS 16

- a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan data di atas, dapat diperoleh F hitung adalah sebesar 107.407. Sedangkan untuk mencari tabel distribusi f dapat dicari dengan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $(n-k)$ atau $120-2 = 118$, maka f tabel yang didapat adalah sebesar 3.07. Dikarenakan $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$ ($107.407 > 3.07$) dan sig sebesar $0.000 < 0.05$, ini menunjukkan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini layak atau fit.

4.7 Pembahasan Penelitian

4.7.1 Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan pajak

Dilihat dari hipotesis pertama, pemeriksaan pajak dikatakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Pengujian hipotesis telah melalui serangkaian uji regresi dimulai dari uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data penelitian diketahui bahwa t_{hitung} variabel pemeriksaan pajak bernilai 2.173 dan t_{tabel} 1,980. Dari hasil tersebut nilai t_{hitung} (2.173) > t_{tabel} (1,980), sehingga pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian H1 diterima dengan nilai signifikan sebesar $0,032 < 0,05$.

Riset penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Meiliawati (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Ahmad Fahrul (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Hasil ini juga sejalan dengan teori atribusi, Teori atribusi relevan dengan hipotesis ini. Dalam teori atribusi untuk menentukan perilaku wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

4.6.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hipotesis penagihan pajak dinilai memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil dari hipotesis yang diolah tersebut, besarnya t_{hitung} variabel penagihan pajak adalah 8,960 dan t_{tabel} 1,980. Dalam hal ini t_{hitung} (8,960) > t_{tabel} (1,980), maka penagihan pajak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian H2 terbukti

deiterima dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang memenuhi syarat nilai sig $< 0,005$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Anastasia Meiliawati (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Hasil penelitian Ahmad Fahrul (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Riset ini mendukung teori atribusi yang menentukan penagihan pajak yang dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Menurut teori atribusi, penagihan pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak apabila proses penagihan pajak dilakukan secara optimal

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan penelitian sekripsi yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Barat” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} adalah 2.173 dengan besarnya nilai signifikan $0,032 < 0,05$. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Variabel penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pengelolaan data yang dilaksanakan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8.960 dengan besarnya nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil ini menandakan bahwa semakin tinggi penagihan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam sekripsi ini masih banyak keterbatasan seperti kurangnya variabel, Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, dapat diperluas dengan penambahan variabel seperti, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan variabel lainnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini, maka terdapat beberapa saran yang ditunjukkan kepada para penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak dapat ditingkatkan lagi, mengingat masih banyak wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai yang mengakibatkan potensi penerimaan pajak berkurang.
2. Penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak fiscus terus ditingkatkan, mengingat masih banyak wajib pajak yang masih enggan membayar pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Agriyanto et al. 2022)Agriyanto, Ratno, Irma Istiariyani, Tri Widiastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati. 2022. "Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus." *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2): 235–43.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Azzahra, Najelaa, and Diamonalisa Sofianty. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Bandung Conference Series: Accountancy* 3(1): 1–13.
- Gorontalo, Universitas Negeri. 2021. "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak." (November): 46–47.
- Herlyastuti, Novi. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Keysha, Alif Illafi, and Angky Febriansyah. 2019. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Periode 2015-2017)." : 1–7.
- Luthfi, Muh. Khaidir, and Ambo Asse. 2019. "Pajak Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW." *Laa Maisyir* 6(1): 38–52.
- Mohammad, Indira, David Paul Elia Saerang, and Sonny Pangerapan. 2017. "Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2): 938–49.
- (Keysha and Febriansyah 2019)(Azzahra and Sofianty 2023)(Luthfi and Asse 2019)(Keysha and Febriansyah 2019)(Meiliawati 2013)(Herlyastuti 2018)(Herlyastuti 2018)(Mohammad,

Saerang, and Pangerapan 2017)(Gorontalo 2021)

Muhammad Bagus, Nuramalia Hasanah, Achmad Fauzi, Pengaruh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019-2021, Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing Vol. 3, No. 3, Desember 2022, 766-780.

Simanjuntak, Imam, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak, 2018 hl-1

Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). Kajian Akuntansi, 19(2), 84–92.

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS21 Update PLS Regresi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013

Nugroho, Untung. Metode Penelitian Kuantitatif, Grobogan, CV Sarnu Untung

Thomas Sumaran 2011, Diana Sari, Siti Kurnia Rahayu, Penyusunan indikator pemeriksaan pajak penagihan pajak kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>

Ramadhan, ardito, Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul Pada Tahun 2019, Kompas.com, 18 Februari 2020., [www. Nasional.kompas.com/read/2020/02/18/Icw-korupsi-dana-desa-terbanyak-tahun2019](http://www.Nasional.kompas.com/read/2020/02/18/Icw-korupsi-dana-desa-terbanyak-tahun2019). Diakses pada tanggal 18 Juni 2020

Rianto, Slamet, dkk. Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Sleman, Deepubliser, 2020

Rohmah, Noer. Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif al Qur'an Dan Hadits, Malang, 2019

Seran, Sirilius. Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial, Sleman, CV. Budi Utama, 2020

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, CV. Alfabeta, 2010

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Riyanto , S. F. (2014). Pengaruh Pemerisaan Pajak Dan Pelaksanaan PenagihanPajak Terhadap

Penerimaan Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.

Syahab, Z. M., & Gisijanto, H. A. (2008). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, 140.

Wulandari, S., Ilat, V., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol.2 No.2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

BIODATA/IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia : 20-30
 40-60
 >61
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat D3
 S1-S3
5. Lama Bekerja : 1-2 tahun 3-4 tahun
 >5tahun Lainnya

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda check list (√) pada alternatif jawaban yang tersedia sesuai pendapat Bapak/ibu/saudara/i. Setiap pertanyaan mengharapkan ada satu jawaban. Skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Angka 4 = SS (sangat setuju) :

Angka 3 = S (setuju)

Angka 2 = TS (tidak setuju)

Angka 1 = STS (sangat tidak setuju)

A. KUESIONER PEMERIKSAAN PAJAK (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib pajak takut terkena pemeriksaan perpajakan apabila melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.				
2.	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan penuh kewajiban perpajakan.				
3.	Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur dan mengantisipasi adanya kecurangan pajak.				
4.	Wajib pajak yang diperiksa wajib mengajukan keberatan.				
5.	Pemeriksaan rutin dilakukan dalam rangka pengawasan, bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak.				
6.	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindak pidana dibidang perpajakan.				
7.	Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi wajib pajak yang diperiksa.				

B. KUESIONER PENAGIHAN PAJAK (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak harus dilakukan penagihan.				
2.	Membayar pajak sesuai jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak.				
3.	Jumlah tagihan pajak yang dikeluarkan oleh KPP				

4.	Surat teguran diterbitkan apabila wajib pajak memiliki tunggakan pajak.				
5.	Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa.				
6.	Penyitaan barang milik wajib pajak dilakukan apabila wajib pajak wajib pajak tidak cukup untuk melunasi.				
7.	Pelelangan barang milik Wajib Pajak harus diberitahukan kepada Wajib Pajak.				

C. KUESIONER PENERIMAAN PAJAK (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Sumber utama penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak.				
2.	Peran penerimaan pajak sangat penting dalam pembangunan negara.				
3.	Penerimaan pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara yang diberikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat.				
4.	Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat pajak merupakan hal yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.				
5.	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan pajak disektor pajak semakin meningkat.				

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

X1 1	X1 2	X1 3	X1 4	X1 5	X1 6	X1 7	TOTAL X1
1	3	3	2	3	3	2	17
3	2	1	2	3	4	3	18
3	4	4	3	4	4	4	26
1	1	1	1	1	1	1	7
2	2	2	2	2	2	2	14
3	4	4	3	4	4	4	26
4	4	4	3	4	4	4	27
1	1	1	2	1	2	2	10
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	2	4	4	3	25
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	1	3	1	4	21
4	4	4	2	4	4	4	26
3	4	4	1	2	2	3	19
4	4	4	1	3	1	4	21
3	3	3	1	3	2	3	18
3	4	4	2	4	4	3	24
4	4	4	1	4	4	4	25
3	4	3	1	3	1	3	18
3	3	4	4	4	4	4	26
4	4	3	3	3	4	4	25
4	4	4	3	3	4	4	26
2	3	3	1	3	4	4	20
3	3	4	3	4	3	2	22
4	3	4	3	4	3	4	25
3	3	4	2	3	3	4	22
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	2	3	3	2	3	19
4	4	4	2	4	4	3	25
3	4	4	3	3	3	3	23
4	4	4	3	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	3	27
2	4	3	2	3	4	3	21
3	4	4	4	3	4	4	26
4	3	4	4	4	4	3	26
4	3	4	3	4	3	4	25
3	3	4	3	4	4	4	25
3	3	3	4	4	3	4	24
4	4	3	3	3	4	3	24
3	4	4	3	3	2	2	21
3	4	3	4	4	4	2	24
4	4	3	2	4	1	2	20
3	3	3	3	4	4	4	24

3	4	3	4	4	4	2	24
4	3	4	4	4	4	3	26
3	4	3	4	4	4	4	26
4	4	4	1	1	4	4	22
3	3	4	4	4	4	4	26
4	3	3	4	2	3	3	22
3	4	4	3	4	4	4	26
3	3	3	4	4	3	4	24
3	3	4	3	3	3	3	22
4	4	4	4	3	3	3	25
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	4	4	3	23
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	4	3	3	3	3	23
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	1	4	4	4	25
3	4	4	2	4	4	4	25
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	1	4	3	2	22
2	4	4	2	4	4	4	24
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	3	4	4	4	27
4	4	4	2	3	2	2	21
4	4	4	1	4	1	4	22
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	2	4	2	2	22
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	2	3	3	3	23
4	4	4	1	4	3	3	23
3	4	3	1	4	4	4	23
3	4	3	2	3	3	3	21
3	3	4	2	4	4	3	23

3	4	3	2	4	3	3	22
4	4	4	1	4	4	4	25
4	4	4	1	3	3	4	23
3	4	4	1	4	4	4	24
4	3	3	2	3	3	3	21
3	4	4	3	4	4	4	26
3	4	3	4	4	3	4	25
3	4	4	4	3	4	3	25
1	4	1	4	1	4	4	19
4	4	3	3	3	4	4	25
4	4	1	1	4	1	4	19
4	4	4	4	3	3	3	25
3	4	4	4	3	3	4	25
3	4	3	4	4	4	4	26
4	4	4	2	4	2	4	24
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	1	4	1	4	22
3	4	3	4	3	4	4	25
3	4	3	4	4	4	4	26
3	4	4	3	4	3	4	25
3	4	4	3	4	3	4	25
4	3	4	3	4	3	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	3	3	3	4	3	22
4	3	4	3	4	4	3	25
3	4	3	4	4	3	4	25

b. Variabel Penagihan Pajak (X2)

X2 1	X2 2	X2 3	X2 4	X2 5	X2 6	X2 7	
2	3	3	2	3	3	3	19
1	1	2	2	3	3	4	16
4	4	4	4	4	3	3	26
2	2	2	2	2	2	2	14
2	2	2	2	2	2	2	14
4	4	3	4	3	2	4	24
4	4	4	4	3	3	3	25
1	1	1	2	2	2	2	11
4	4	4	4	3	4	4	27
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	4	4	4	4	27
4	4	4	4	1	2	4	23
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	3	4	3	4	26
3	3	4	4	4	3	4	25
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28

3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	4	4	4	4	27
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	2	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	3	3	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	2	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	3	3	4	26
4	3	3	3	3	3	3	22
2	4	4	3	3	2	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	1	4	3	4	24
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	2	3	3	3	3	20
4	3	3	3	4	4	4	25
3	4	3	3	4	4	3	24
3	4	3	4	4	4	4	26
4	1	4	4	4	4	1	22
4	4	4	4	4	3	3	26
4	1	4	4	1	1	4	19
4	3	4	4	3	3	4	25
4	3	3	4	3	4	3	24
3	4	4	3	3	4	4	25
4	3	4	4	4	4	4	27
3	3	3	2	3	2	4	20
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	4	3	4	4	25
4	3	3	4	4	3	4	25
4	3	3	3	4	4	4	25
3	4	3	4	3	4	3	24
4	3	4	4	3	3	4	25
4	4	4	4	2	2	3	23
3	3	3	3	3	4	4	23
3	4	4	4	4	3	4	26

4	3	3	3	4	4	4	25
---	---	---	---	---	---	---	----

c. Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
3	3	3	3	3	15
3	3	2	1	4	13
4	4	3	4	4	19
1	2	2	2	2	9
2	2	2	2	2	10
4	3	3	3	3	16
4	3	4	3	4	18
1	1	1	1	1	5
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	4	20
3	4	3	3	3	16
4	4	2	4	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
3	3	3	3	3	15
4	4	3	4	4	19
3	3	3	3	4	16
3	4	3	4	4	18
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	3	17
3	4	3	3	3	16
3	4	4	3	4	18
3	3	2	2	3	13
4	3	3	3	2	15
4	4	4	4	3	19
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	15
4	3	4	3	4	18
3	3	4	4	4	18
4	3	4	3	3	17
3	3	2	3	3	14

3	4	4	3	3	17
3	3	3	4	4	17
4	3	3	3	3	16
3	4	3	4	4	18
3	4	4	4	3	18
3	4	4	3	4	18
4	1	4	4	4	17
3	4	4	3	4	18
3	4	4	4	4	19
4	4	3	3	3	17
3	1	3	3	3	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	2	4	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	2	4	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	1	4	4	17
4	4	2	3	3	16
4	4	1	4	4	17
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

4	4	2	4	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	4	14
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	2	3	4	17
4	4	4	4	4	20
3	3	2	3	3	14
4	3	4	3	3	17
4	3	4	4	3	18
3	3	4	4	3	17
1	4	1	4	4	14
4	4	3	3	3	17
4	4	4	1	4	17
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	1	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	3	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
3	4	3	3	4	17
3	4	3	4	4	18
4	3	4	4	3	18
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	4	18
3	4	3	4	4	18
3	4	3	4	3	17

Lampiran 3 Hasil Output SPSS_Uji validitas

A. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1 1	20.07	8.769	.448	.444	.664
X1 2	19.81	8.963	.516	.398	.655
X1 3	19.92	8.296	.562	.494	.635
X1 4	20.10	8.773	.450	.450	.670
X1 5	19.94	8.324	.580	.394	.633
X1 6	20.11	8.114	.460	.310	.658
X1 7	19.99	8.681	.497	.319	.653

B. Variabel Penagihan Pajak (X2)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	20.7250	9.445	.572	.418	.843
VAR00002	20.7500	9.063	.592	.410	.841
VAR00003	20.7083	9.234	.683	.534	.829
VAR00004	20.6750	9.146	.637	.478	.834
VAR00005	20.7667	8.937	.642	.573	.834
VAR00006	20.8000	9.018	.612	.527	.838
VAR00007	20.6250	9.379	.623	.452	.837

C. Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	13.91	4.487	.624	.393	.759
Y2	13.86	4.526	.596	.447	.767
Y3	14.14	4.341	.463	.264	.821
Y4	13.97	4.268	.664	.463	.745
Y5	13.89	4.585	.664	.483	.751

Lampiran 4 Hasil Output SPSS_Uji realibilitas

A. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	7

B. Variabel Penagihan Pajak (X2)

Reliability Statistics

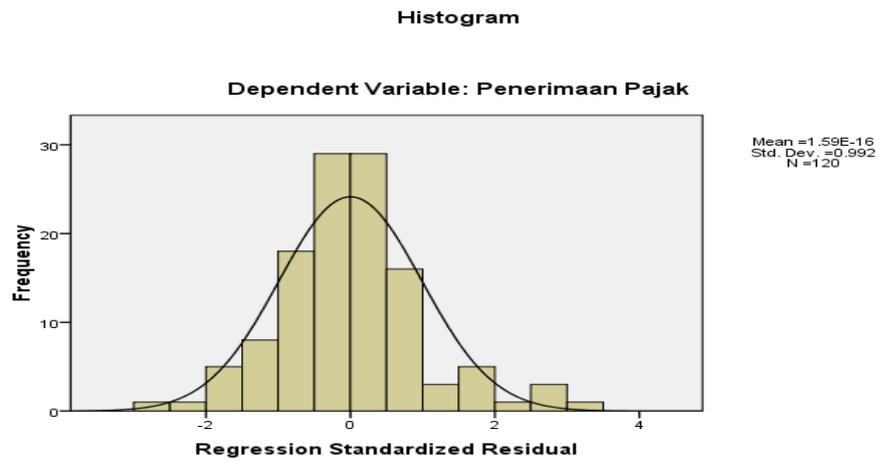
Cronbach's Alpha	N of Items
.857	7

C. Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	5

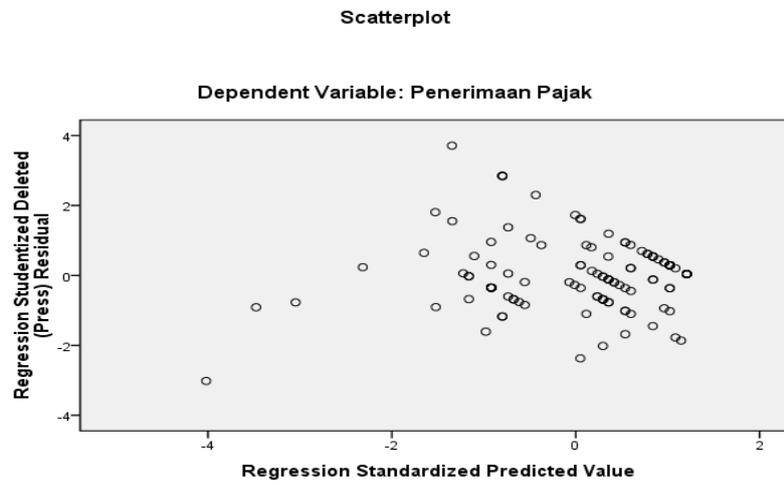
Lampiran Hasil 5 Uji Normalitas



Lampiran 6 Hasil Output SPSS_Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemeriksaan Pajak		
Penagihan Pajak	,521	1,919
	,521	1,919

Lampiran 7 Hasil Output SPSS_Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 8 Hasil Output SPSS_Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,982	1,078		2,161	0,033
Pemeriksaan Pajak	0,127	0,058	0,165	2,173	0,032
Penagihan Pajak	0,502	0,056	0,681	8,960	0,000

Coefficients^a

Lampiran 9 Hasil Output SPSS_Uji Koefisien Regresi Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.330	1.078		2.161	.033
Pemeriksaan Pajak	.127	.058	.165	2.173	.032
Penagihan Pajak	.502	.056	.681	8.960	.000

Lampiran 11 Hasil Output SPSS_Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.647	.641	1.541

Lampiran 12 Hasil Output SPSS_Uji Simultan F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	509.882	2	254.941	107.407	.000 ^a
	Residual	277.710	117	2.374		
	Total	787.592	119			

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Lampiran 13 Surat E Riset KPP Semarang Barat

e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

1 pesan

<edukasi@pajak.go.id>
Balas ke: edukasi@pajak.go.id
Kepada: dianm2321@gmail.com

Set, 22 Agt 2023 pukul 09.14



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor	: 03121-2023
Tanggal	: 22 Agustus 2023
Nama	: Zuliani Saputri
NIM	: 1905046020
Kategori riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	: Iain Walisongo Semarang
Judul Riset	: Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Izin yang diminta	:

- Permohonan Kuisisioner.

Terima kasih, kami telah menerima permohonan Anda. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda melalui www.edukasi.pajak.go.id



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema penelitian. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



Zuliani Saputri

dianm2321@gmail.com

Daftar Pengajuan

Riwayat Pengajuan Riset Terbaru

Tambah

PERMOHONAN ^	JUDUL UNIT	KETERANGAN	STATUS
 03121-2023 22 Agustus 2023	PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN ... KPP Pratama Semarang Barat	MENUNGGU PENERBITAN/PENOLAKAN IZIN	Terima
 02970-2023 10 Agustus 2023	PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN ... Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak	PERMOHONAN DITOLAK	Tolak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zuliani Saputri
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Balik, 02 May 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebun Baru (Aceh)
Nomot Telepon/Hp : 081339396308
Email : zulianisaputri578@gmail.com.

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Simpang Balik
2. SDN 3 Kebun Baru
3. SMPN 1 Wih Pesam
4. SMA Unggul Binaan Bener Meriah
5. Uin Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 september 2023

Penulis



Zuliani Saputri